

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG DAN KOTA
SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2004-2012**

Oleh:

Rieke Faradila Rachman

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

JL.MT. Haryono 165 Malang

Faradila.rieke@gmail.com

ABSTRACT

This research was aim to: (1) comparing monetary performance of local government of town of Malang and town of Surabaya in the budget year 2004 until 2012. (2) To know monetary performance picture of town area of Malang and town of Surabaya in last nine years (2004-2012) and (3) to know revenue plan performance and area expense (APBD) at government of town of Surabaya and Town of Malang in 2004-2012 evaluated from monetary independence ratio of area, ratio of effectiveness PAD and monetary efficiency of area, compatibility ratio, and growth.

Keywords: performance analysis of government finance

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012. 2) Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012 dan 3) Untuk mengetahui rasio keserasian Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012 4) d. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya

tahun anggaran 2004-2012. 5) Untuk mengetahui terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil penelitian pada obyek penelitian yang mencoba mengetahui dan memecahkan permasalahan yang dihadapi instansi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah rasio Kemandirian Keuangan Daerah, rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivitas dan menggunakan Uji beda *T-Test*.

Kinerja keuangan Pemerintah daerah pada Kota Surabaya tahun 2004 sampai 2012 apabila ditinjau dari rasio kemandirian menunjukkan adanya kinerja yang berfluktuasi, rasio efektivitas menunjukkan adanya penurunan, Pemerintah Daerah Kota Surabaya tidak efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal sehingga rasio belanja operasional terhadap APBD relatif lebih kecil, mengutamakan penyediaan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat dan rasio pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan. Kinerja keuangan Pemerintah daerah pada Kota Malang, apabila ditinjau dari rasio kemandirian menunjukkan adanya kinerja yang berfluktuasi, Rasio efektivitas meningkat, tidak efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan dan rasio pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Surabaya.

PENDAHULUAN

Pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah pada masa yang akan datang, sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijakan yang telah dipilih atas pelaksanaan anggaran daerah. Selanjutnya melalui pengukuran atas kinerja keuangan daerah dengan sendirinya dapat

digunakan sebagai alat bagi masyarakat untuk mengawasi atas pelaksanaan dan mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijaksanaan anggaran daerah (Halim, 2002).

Selanjutnya terkait dengan pengukuran atas kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai pada suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan atas kinerja keuangan yang telah terjadi. Beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data keuangan yang dimiliki dan bersumber pada APBD antara lain rasio kemandirian (otonomi fiskal), rasio efektivitas dan efisiensi serta *debt service coverage ratio* (Halim, 2002).

Hasil penelitian Widodo (2001) yang melakukan analisis terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah yang diperoleh yaitu kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam memenuhi kebutuhan dana untuk menyelesaikan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih relatif dan bahkan cenderung mengalami penurunan yaitu dari 16,65% pada tahun anggaran 1997/1998 menjadi 9,69% pada tahun anggaran 2000. Pendapatan daerah diprioritaskan untuk mencukupi belanja rutin yaitu mencapai rata-rata sebesar 80% dari total pendapatan yang diterima. Aktivitas penyerapan dana yaitu sebesar 72,96% dari total anggaran pembangunan dan secara potensial apabila terjadi kekurangan dana dapat melakukan pinjaman dana dengan maksimum pokok angsuran sebesar Rp. 15,055 miliar

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

- a. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012?
- b. Bagaimana efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012?
- c. Bagaimana rasio keserasian Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012?

- d. Bagaimana rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012?

TUJUAN PENELITIAN

- 1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012
- 2) Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012.
- 3) Untuk mengetahui rasio keserasian Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012.
- 4) Untuk mengetahui rasio pertumbuhan keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012.
- 5) Untuk mengetahui terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya tahun anggaran 2004-2012

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya. Dengan pengambilan data yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu jenis penelitian yang berisikan paparan atau data yang relevan dari hasil penelitian pada obyek penelitian yang mencoba mengetahui dan memecahkan permasalahan yang dihadapi perusahaan. Sedangkan prosedur pemecahan masalah pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis mengadakan pengamatan langsung atau studi lapangan pada obyek dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Langkah ini berupa kegiatan mengumpulkan data-data sekunder dengan cara melihat atau menyalin catatan

kertas kerja yang dianggap berhubungan dengan penelitian. Adapun untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut: (Halim, 2007:232) yang meliputi: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio keserasian, analisis trend dan Uji beda *T-Test*, Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji-t, yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata di antara dua kelompok sampel. Pengujian melalui signifikansi *t-value* adalah membandingkan signifikansi *t-value* dengan probabilitas 5%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Kota Surabaya dapat diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dimana Pemerintah Daerah pada Kota Surabaya masih memiliki ketergantungan atas sumber dana dari pemerintah pusat baik melalui pengoptimalkan sumber pendapatan yang menjadi sumber pendapatan daerah sehingga dapat mendukung pencapaian pendapatan asli daerah yang akan diperoleh. Namun ketergantungan tersebut sudah mulai berkurang dan pemerintah kota surabaya dinilai mulai mampu melaksanakan otonomi daerah. Rasio kemandirian yang digunakan dalam penelitian ini belum bisa sepenuhnya digunakan untuk menghitung tingkat kemandirian di pemerintah daerah dan hanya bisa memberikan penilaian tentang pelaksanaan otonomi daerah pada kota surabaya, dikarenakan hampir seluruh pemerintah daerah masih tergantung kepada bantuan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Pada Kota Surabaya belum mampu merealisasikan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah dengan target yang telah ditetapkan. Kondisi itu terjadi karena target dalam pencapaian PAD belum mampu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah. Sehingga kemampuan pengelolaan asset daerah dan bantuan pusat menjadi tolak ukur keberhasilan daerah. Dalam penelitian ini rasio

efektifitas sudah mampu menjelaskan bahwa pemerintah daerah kurang dapat menggali potensi-potensi daerah untuk menambah sumber pendapatan asli daerah sehingga target yang telah ditetapkan belum banyak tercapai. Pencapaian atas kinerja tersebut dapat mencerminkan dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi dapat diketahui bahwa untuk sembilan tahun terakhir Pemerintah Daerah Kota Surabaya dapat dikategorikan efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Semakin tingginya rasio efisiensi dapat menunjukkan semakin meningkatkan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah sebagai upaya melakukan efisiensi atas pengeluaran rutin daerah. Kondisi itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi atas biaya yang dikeluarkan untuk belanja daerah sehingga lebih kecil apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio efisiensi dapat digunakan sebagai dasar penilaian dikarenakan dapat menunjukkan tingkat efisiensi dalam pengelolaan dan penggunaan PAD terhadap belanja yang dilakukan oleh pemerintah. Hasil analisis menunjukkan adanya kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja secara efisien sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pengelolaan dana yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pajak maupun retribusi yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Hasil rasio keserasian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sehingga rasio belanja modal terhadap APBD relatif lebih kecil. Kondisi ini menyebabkan kinerja keuangan apabila ditinjau dari rasio belanja operasional masuk dalam kategori tidak baik. Kondisi kinerja yang tidak baik dikarenakan adanya peningkatan total belanja daerah untuk pembiayaan aktivitas operasional daerah. Apabila ditinjau dari rasio belanja modal menunjukkan sebagian besar dana yang dimiliki diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional dalam hal ini terkait dengan penyediaan fasilitas maupun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Adanya peningkatan atas belanja

operasi dikarenakan adanya peningkatan atas biaya yang digunakan untuk kegiatan operasional pelayanan masyarakat sehingga terjadi peningkatan rasio belanja operasi. Namun dalam kenyataannya kinerja keuangan pemerintah kota Surabaya tidak bisa dinilai tidak baik, karena berdasarkan data pada laporan realisasi anggaran, belanja operasi lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai yang langsung dirasakan oleh masyarakat seperti pembayaran gaji dokter, guru, dan layanan masyarakat yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peningkatan belanja operasi dikarenakan banyak dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan sarana-sarana yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat diketahui bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kota Surabaya menunjukkan adanya rasio pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan. Penurunan kinerja pertumbuhan menunjukkan kurang maksimalnya upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan potensi daerah yang dimiliki sehingga kurang memberikan kontribusi secara maksimal dalam upaya pencapaian PAD. Rasio pertumbuhan yang digunakan pada penelitian ini cukup mampu untuk menunjukkan pertumbuhan PAD pemerintah kota Surabaya yang cenderung menurun dan menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat juga menurun.

Hasil analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Malang apabila ditinjau dari rasio kemandirian keuangan daerah dapat diketahui bahwa dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan pembiayaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat menunjukkan adanya kondisi yang kurang baik. Kondisi ini terjadi karena adanya ketergantungan atas sumber dana dari pemerintah pusat baik melalui pengoptimalkan sumber pendapatan yang menjadi sumber pendapatan daerah. Adanya ketergantungan tersebut dapat menyebabkan menurunnya kemandirian daerah dalam menjalankan aktivitas operasional daerah dan rasio ini dapat digunakan sebagai dasar dalam penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pada penelitian di kota Malang rasio kemandirian tidak bisa

digunakan untuk menilai kemandirian pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, karena kota malang sebagai kota berkembang masih sangat membutuhkan bantuan pemerintah dalam upaya peningkatan PAD yang digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan hanya bisa menunjukkan upaya pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Analisis rasio efektifitas pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Pada Kota Malang mampu merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang telah ditetapkan yang bersumber dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Rasio efektifitas yang digunakan mampu untuk menilai kinerja keuangan kota malang dan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD dengan PAD yang ditetapkan dan kemampuan daerah dalam menggali potensi-potensi daerah yang ada untuk mencapai PAD yang ditargetkan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang telah efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Kenyataan tersebut dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi atas pengeluaran daerah sehingga dapat memaksimalkan hasil PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Rasio efisiensi sudah tepat digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemerintah daerah kota malang dalam menggunakan PAD untuk melakukan pengeluaran daerah yang digunakan sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai alat pertanggung jawaban pemerintah daerah terhadap pengelolaan dana yang dibayarkan oleh masyarakat untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis rasio keserasian menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kota Malang sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sehingga rasio belanja operasional menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan belanja modal. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa sebagian besar dana yang dimiliki tidak diprioritaskan untuk kebutuhan belanja modal, hal ini menunjukkan

bahwa Pemerintah Daerah Kota Malang belum mengutamakan penyediaan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat. Rasio keserasian yang terdapat dalam penelitian ini dapat digunakan untuk melihat kinerja pemerintah dalam mengalokasikan PAD untuk belanja. Adanya peningkatan belanja operasional dikarenakan adanya peningkatan atas belanja pegawai/ personalia seperti dokter, guru dan lain-lain, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan. Belanja operasi tersebut digunakan sebagai bentuk peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

Hasil analisis rasio pertumbuhan (*growth ratio*) menunjukkan adanya penurunan kemampuan pemerintah daerah kota malang dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Adanya penurunan tersebut juga mengindikasikan adanya penurunan atas kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi daerah dalam upaya peningkatan PAD. Rasio pertumbuhan ini kurang mampu digunakan secara maksimal untuk pemerintah daerah kota malang, karena sebagai kota berkembang pemerintah daerah kota malang belum sepenuhnya mampu menggali potensi-potensi daerah untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis trend yang disajikan menunjukkan bahwa peramalan rasio kemandirian pada kota surabaya adalah sebesar 45,269% jika dibandingkan dengan hasil analisis rasio pada tahun 2012 yang menunjukkan angka 49,19% dan rasio kemandirian kota malang diramalkan pada tahun 2013 menunjukkan 14,932% dibandingkan tahun 2012 sebesar 16,94% dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat dan dapat menunjukkan pemerintah daerah kota surabaya dan malang belum dapat menjalankan otonomi daerah dengan baik.

Analisis trend pada rasio efektifitas kota surabaya pada tahun 2013 sebesar 85,942% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 97,37% dan kota malang untuk tahun 2013 sebesar 114,32% dan tahun 2012 sebesar 114,52% menunjukkan kota

surabaya dan kota malang menunjukkan adanya penurunan realisasi penerimaan PAD yang dapat disebabkan kurangnya upaya pemerintah daerah dalam menggali potensi daerah. Pada rasio efisiensi untuk tahun 2013 kota surabaya sebesar 108,974% dan tahun 2012 sebesar 92,77% sedangkan kota malang untuk tahun 2013 sebesar 93,273% dan untuk tahun 2012 92,32% yang berarti kota surabaya dan kota malang menunjukkan peningkatan dalam melakukan alokasi belanja terhadap PAD yang diterima sebagai tanggung jawab kepada masyarakat.

Analisis trend pada rasio keserasian belanja operasi kota surabaya pada tahun 2013 sebesar 93,679% dan tahun 2012 sebesar 78,67%, peramalan untuk kota malang tahun 2013 sebesar 79,694 dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 78,52%. Sedangkan untuk belanja modal pada tahun 2013 menunjukkan presentase sebesar 26,613% dan tahun 2012 sebesar 21,23% dan analisis trend belanja modal untuk kota malang pada tahun 2013 sebesar 23,292%, untuk tahun 2012 sebesar 21,23% hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota surabaya dan kota malang untuk tahun 2013 terdapat upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana prasarana ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat yang diimbangi dengan meningkatnya belanja operasi pada tahun 2013.

Berdasarkan hasil analisis perbedaan kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kota Surabaya dan Kota Malang dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Surabaya. Adanya perbedaan kinerja keuangan menunjukkan bahwa selama periode penelitian terdapat perbedaan terkait dengan kemampuan daerah dalam pencapaian kinerja keuangan daerah terkait dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio belanja modal terhadap APBD dan rasio pertumbuhan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan atas kemampuan daerah untuk melakukan efisiensi dan pengendalian operasional daerah sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adanya perbedaan secara signifikan menunjukkan adanya perbedaan atas kinerja keuangan daerah yang mencerminkan kondisi riil pencapaian kinerja pada daerah. Hasil tersebut menunjukkan adanya kemampuan daerah untuk

meningkatkan kinerja keuangannya secara langsung dapat memberikan dukungan atas perbedaan pencapaian kinerja pada daerah. Perbedaan tersebut juga mencerminkan kemampuan instansi dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kinerja instansi. Hasil analisis juga menjadikan dasar penilaian atas kemampuan instansi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Rasio kemandirian menunjukkan adanya kinerja yang kurang baik mulai tahun 2004 sampai 2012. Dari hasil penelitian analisis rasio kemandirian, kota surabaya berada di pola konsultatif dengan rata-rata 35,13%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Pada Kota Surabaya dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan pembiayaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat menunjukkan adanya kondisi yang pendapatannya cenderung masih mendapat bantuan dari pemerintah pusat, sehingga belum bisa melaksanakan otonomi daerah dengan baik.
- b. Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan rata-rata 97,53%. Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa Pemerintah Daerah Pada Kota Surabaya dapat dikategorikan tidak efektif, hal tersebut dikarenakan rasio yang telah dicapai kurang dari 1 (satu) atau 100%.
- c. Berdasarkan hasil perhitungan analisis rasio efisiensi dengan rata-rata 94,24% dapat diketahui bahwa untuk sembilan tahun terakhir Pemerintah Daerah Kota Surabaya termasuk dalam kategori efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rasio efisiensi yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 100 persen.
- d. Secara umum Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional sehingga rasio belanja modal terhadap belanja daerah relatif lebih kecil. Pemerintah

Daerah Kota Surabaya kurang mengutamakan penyediaan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat.

- e. Rasio pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya penurunan atas pencapaian pertumbuhan atas pendapatan asli daerah setiap periodenya

2. Kinerja keuangan Pemerintah daerah pada Kota Malang tahun 2004 sampai 2012

- a. Hasil analisis rasio kemandirian dengan rata-rata 13,53% menunjukkan adanya kinerja yang instruktif mulai tahun 2004 sampai 2012. Kinerja keuangan tersebut juga mempengaruhi penilaian atas pencapaian kinerja, Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Pada Kota Malang dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan pembiayaan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat.
- b. Rasio efektivitas pada Pemerintah Daerah Pada Kota Malang menunjukkan rata-rata 105,22%. Hasil tersebut menunjukkan adanya kecenderungan mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan telah efektif, hal tersebut dikarenakan sebagian besar rasio yang telah dicapai lebih dari 1 (satu) atau 100%.
- c. Pemerintah Daerah Kota Malang sudah efisien dalam menjalankan aktivitas pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan rata-rata hasil rasio efisiensi adalah 97,16% yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau 100 persen. Di kategorikan efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD lebih kecil apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Sebagian besar dana yang dimiliki tidak diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasional, hal tersebut menunjukkan bahwa

Pemerintah Daerah Kota Malang tidak mengutamakan penyediaan sarana prasarana ekonomi bagi masyarakat.

- e. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa secara umum menunjukkan adanya rasio pertumbuhan yang cenderung mengalami penurunan yang dikarenakan adanya penurunan atas pencapaian pertumbuhan atas pendapatan asli daerah setiap periodenya
3. Berdasarkan hasil uji t dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan secara signifikan antara kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Surabaya, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung $>$ t tabel ($2,982 > 2,1600$)
4. Berdasarkan hasil analisis trend yang dilakukan pada kota Malang dan kota Surabaya dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 terdapat peningkatan dari rasio efektifitas, efisiensi dan keserasian dibandingkan tahun 2012. Namun pada rasio kemandirian terjadi peningkatan terhadap pemerintah pusat dibandingkan tahun 2012

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Keterbatasan penelitian pada penelitian ini adalah klasifikasi belanja pada rasio keserasian menggunakan klasifikasi belanja rutin dan pembangunan sedangkan pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2003-2005 menggunakan klasifikasi belanja aparatur daerah dan pelayanan publik dan pada tahun 2006-2012 menggunakan klasifikasi belanja operasi dan modal. Sehingga diharuskan untuk menghitung kembali pos-pos pada klasifikasi belanja terbaru yang disesuaikan dengan belanja rutin dan pembangunan.
2. Keterbatasan dalam penggunaan rasio keserasian dikarenakan klasifikasi belanja rutin dan belanja pembangunan yang digunakan dalam penilaian sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2002, berubah menjadi belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik. Pada tahun 2006 klasifikasi belanja berubah menjadi belanja operasi dan belanja modal, namun memiliki pengertian yang hampir sama.

3. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah rasio kemandirian tidak menghitung tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat, dikarenakan seluruh pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Sehingga rasio kemandirian hanya memberikan informasi kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
4. Keterbatasan data laporan realisasi anggaran tahun 2002 yang tidak dapat dipublikasikan atau diberikan ke publik karena tidak disajikan oleh dinas pendapatan. Sehingga peneliti memberikan solusi dengan mundur 1 tahun anggaran yaitu mulai tahun 2004-2012. Hal ini mohon dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya dalam menetapkan waktu penelitian.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka diajukan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Instansi
 - a. Diharapkan Pemerintah Daerah Kota Malang dan Surabaya selalu berusaha untuk menggali atas potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam aktivitas operasional instansi sehingga pemerintah dapat melaksanakan otonomi daerah tanpa bantuan dari pemerintah pusat
 - b. Pemerintah Daerah Kota Malang dan Surabaya diharapkan untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan dalam bidang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka untuk memberikan jaminan untuk meningkatkan kemandirian daerah.
 - c. Diharapkan pemerintah Daerah Kota Surabaya untuk meningkatkan efektivitas aktivitas operasionalnya, upaya yang harus dilakukan yaitu menggunakan potensi-potensi daerah secara maksimal sehingga target PAD yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal dan pada akhirnya efektivitas pendapatan asli daerah dapat terwujud.

- d. Pemerintah Daerah Kota Malang dan Surabaya harus melakukan efisiensi atas belanja daerah yang dikeluarkan sehingga dapat memaksimalkan realisasi penerimaan daerah.
 - e. Dalam upaya untuk meningkatkan rasio pertumbuhan diharapkan pemerintah daerah Kota Surabaya dan Malang harus menetapkan target atau anggaran kerja yang benar-benar didukung oleh kondisi potensi wilayah serta pemanfaatan aparatur pemerintahan secara maksimal sehingga dapat meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah daerah secara maksimal.
 - f. Diharapkan selalu melakukan pengendalian secara tepat atas sumber-sumber pendapatan daerah. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka untuk menghindari terjadinya penyelewengan atas penggunaan sumber-sumber pendapatan daerah.
 - g. Selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja seluruh elemen yang dimiliki oleh instansi untuk bekerja secara maksimal dalam usaha untuk pencapaian atas anggaran pendapatan asli daerah yang telah ditetapkan.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini diharapkan untuk menyempurnakannya yaitu dengan menggunakan analisis yang berbeda dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan harapan penelitian ini dapat lebih berkembang, sehingga tidak hanya kinerja keuangan saja yang bisa diukur melainkan banyak hal. Apabila dikaitkan dengan data yang digunakan untuk mendukung penelitian diharapkan tidak menggunakan data yang terlalu lama sehingga tidak dapat mencerminkan kondisi kinerja keuangan yang terjadi pada saat ini sehingga tidak relevan dalam penetapan kebijakan yang akan ditetapkan.